**Abednego Andhana Prakosajaya¹
dan Aziza Dwimas Hendarini²**

¹Program Studi Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma, Jalan Afandi
Gejayan, Mrican, Yogyakarta 55281, Indonesia;
posel: abednego.jaya@gmail.com

²Dapartemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Jalan
Sosiohumaniora, No. 1, Bulaksumur,
Yogyakarta 55281, Indonesia;
posel:aziza.d@mail.ugm.ac.id

Diterima 2 Maret 2021

Direvisi 24 Mei 2021

Disetujui 24 Mei 2021

PENGARUH ETIKA DAN KEBIJAKAN ARKEOLOGI TERHADAP KETIADAAN PERAN ARKEOLOGI DALAM DISKUSI KONFLIK PASCA G/30/S 1965 DI INDONESIA

THE IMPACT OF ARCHEOLOGICAL ETHICS AND POLICIES CONCERNING THE ABSENCE OF ARCHEOLOGISTS IN THE DISCUSSION OF POST G/30/S CONFLICT 1965 IN INDONESIA

Abstrak. Konflik pasca G/30/S tahun 1965 merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang banyak menuai kontroversi di masyarakat luas bahkan hingga saat ini. Konflik ini menjadi perhatian luas bidang ilmu politik dan sejarah. Pengungkapannya membutuhkan metode dan ilmu arkeologi untuk menjelaskan fenomena hasil konflik kontemporer di lapangan. Tiga permasalahan yang akan diajukan adalah sejauh mana keterlibatan arkeolog dalam konflik pascaG/30S, apakah etika dan kebijakan arkeologi menjadi pembatas keterlibatan arkeolog dalam kasus ini, dan bagaimana kebijakan serta etika arkeologi di luar negeri menanggapi kasus serupa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketiadaan peran arkeologi terhadap kasus ini dan keterkaitannya dengan etika dan kebijakan arkeologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan pengolahan data analisis konten. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketiadaan peranan arkeologi dalam diskusi perkembangan narasi sejarah pascaG/30/S merupakan akibat dari kontradiksi kebijakan dan etika profesi arkeolog Indonesia dengan etika arkeologi secara luas. Etika arkeologi perlu diprioritaskan supaya arkeologi dapat berperan lebih banyak dalam narasi sejarah pascaG/30/S.

Kata kunci: etika arkeologi, kebijakan arkeologi, konflik G/30/S

Abstract. The post-G/30/S conflict in 1965 is part of Indonesia's history, which has drawn a lot of controversy in the wide community even today. This conflict has received wide attention in the fields of political science and history. The disclosure requires archaeological methods and science to explain the phenomenon of contemporary conflict results in the field. this article will discuss the extent to which archaeologists are involved in the post-G/30S conflict, whether archaeology ethics and policies are a barrier to archaeologists' involvement in this case, and how foreign archaeological policies and ethics respond to a similar matter. This study aims to understand the reasons for the absence of archaeology's role in this case and its relationship to archaeology ethics and policies in Indonesia. This study uses library research methods collected through documentation techniques with content analysis data processing. The results obtained indicate that the absence of archaeology's role in the discussion of the development of post-G/30/S historical narratives is the result of the contradictions between the policies and ethics of the Indonesian archaeologist profession with archaeology ethics in general. Archaeological ethics need to be considered so that archaeology can play a better role in post-G/30/S historical narratives.

Keywords: Archaeological Ethics, Archaeological Policy, Anti Communist Conflict, Post-G/30/S Conflict

PENDAHULUAN

Salah satu paradigma arkeologi adalah penyusunan sejarah kebudayaan (Siregar 2019). Dalam konteks penyusunan sejarah kebudayaan, salah satu prinsip yang harus diperhatikan untuk menghasilkan sebuah historiografi atau penulisan sejarah yang baik adalah ketidakberpihakan atau meminimalisir subjektivitas seoptimal mungkin.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipandang sebagai salah satu sumber subjektivitas. Di sini, etika arkeologi dapat dipandang sebagai sebuah batas yang menjamin netralitas sekaligus berupaya untuk menjaga objektivitas arkeologi dalam penyusunan narasi sejarah untuk memenuhi salah satu tujuan dalam paradigma arkeologi. Akan tetapi dalam penerapannya, etika sendiri merupakan suatu hal yang subjektif dan tidak

memiliki parameter mutlak agar suatu tindakan dapat dikatakan baik atau benar maupun buruk atau salah.

Etika sebagai logika epistemologi dari ilmu filsafat berperan memberikan standar atau penilaian moral untuk diterapkan pada saat mengukur antara baik dan benar atau buruk dan salah dalam suatu hal. Dalam hal ini perilaku dan tindakan manusia dinilai dari etika yang berlaku pada lingkungannya, sehingga dapat dimaknai bahwa penerapan etika itu berbeda di tiap lingkungan baik sosial-masyarakat maupun ilmu pengetahuan. Etika arkeologi telah menjadi pembicaraan serius di dunia barat sejak abad ke-20 yang kemudian mempengaruhi dunia arkeologi secara keseluruhan, khususnya dalam melakukan pekerjaan arkeologi. Etika yang telah dirumuskan ini digunakan sebagai *guideline* atau acuan untuk para arkeolog dalam melakukan pekerjaan hingga dapat dikatakan bekerja secara profesional. Etika arkeologi dimaknai sebagai prinsip-prinsip yang ditetapkan sebagai nilai ideal untuk perilaku atau tindakan yang benar yang mengungkapkan nilai-nilai umum pada profesi (Beaudry 2009).

Dalam melakukan tindakan sebagai seorang arkeolog, etika atau tata perilaku yang ditampilkan merupakan wajah dari arkeologi. Oleh karena itu, etika memperhatikan penilaian kritis dari karakter seseorang yang mewakili statusnya. Etika arkeologi menekankan pada penilaian moral dalam menanggapi segala fenomena arkeologi yang terjadi di sekitarnya. Etika bukan hanya membahas boleh dan tidak boleh, benar dan salah, namun lebih kepada moral tanggung jawab sebagai arkeolog termasuk kebermanfaatannya, tujuan, hubungan sosial, bahkan hingga sikap personal. Konsep ini kemudian akan mempengaruhi etika profesional arkeologi. Etika arkeologi secara luas mencakup kepemilikan cagar budaya dan hubungannya dengan suku asli, masalah *looting* dan perdagangan, serta bagaimana arkeolog merawat artefak sebagai benda mati (Scarre dan Scarre 2006).

Berbeda dengan etika arkeologi, etika profesi arkeologi dibuat oleh organisasi resmi yang diakui pemerintah dan berlaku dalam pekerjaan yang dilakukannya. Sasaran diberlakukannya etika ini adalah dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan arkeolog terhadap publik, dan juga

pemerintah, terkait dengan bagaimana bahwa arkeologi di Indonesia sangat terikat dengan pemerintahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Etika arkeologi Indonesia dituangkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dalam tujuh pasal yang dapat dilihat pada laman resminya. Ilmu pengetahuan secara umum memahami etika sebagai pemberi gelar profesional pada pelakunya secara tak langsung yang artinya bahwa tiap-tiap arkeolog harus memenuhi etika dalam melakukan pekerjaannya secara profesional. Namun, hal yang sering dijumpai justru etika yang telah dibuat oleh arkeolog menjadi pedang bermata dua. Etika arkeologi disusun sebagai tuntutan dunia yang semakin modern untuk berperilaku sebagai profesional dalam bekerja secara praktik, bukan hanya hitam di atas putih untuk menghadapi dunia dengan konsep arkeologi kontemporer (Lynott 1997).

Etika arkeologi dalam konteks ini hendaknya dibedakan dengan etika profesi arkeologi yang sebelumnya telah dibahas. Dalam konteks ini, etika arkeologi merupakan sebuah acuan yang mengikat arkeolog untuk bertindak seobjektif mungkin dalam rangka menjunjung tinggi profesionalitas dan kredibilitas ilmu arkeologi sesuai bidang keahliannya. Etika arkeologi seharusnya menjadi motivasi dan sarana bagi arkeolog untuk menyampaikan hasil temuan dan interpretasi mereka seobjektif mungkin tanpa harus memikirkan konsekuensi terutama tekanan dari pihak manapun. Tekanan di sini tentunya termasuk tuntutan dari etika profesi arkeologi yang dalam beberapa perspektif dapat diinterpretasikan berlawanan dengan etika arkeologi dalam cakupan ini.

Berbeda dengan etika yang dibuat dan dijalankan oleh arkeolog sendiri, kebijakan arkeologi ditentukan dalam Undang-Undang yang telah disetujui oleh pemerintah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya telah mengalami perubahan sejak namanya masih *Monumenten Ordonantie 1931* sebagai dasar pijakan kegiatan arkeologi sebagai bentuk penyelarasan zaman. Undang-Undang yang mengatur kebijakan kegiatan arkeologi hingga pengelolaan cagar budaya serta penanganannya ini menjadi dasar kegiatan arkeolog Indonesia yang harus diikuti mengingat umumnya mereka

tergabung dengan instansi yang bekerja untuk pemerintah.

Posisi arkeologi ini membawa hal positif dan juga negatif. Sisi positif dari posisi arkeologi yang berada di bawah pemerintahan adalah mereka mendapatkan perlindungan jika melakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan tersebut, namun di sisi lain para ahli berada di ambang keintegritasan mereka. *Archaeological knowledge* tidak akan menjadi objektif jika diikuti dengan kepentingan pemerintah untuk menutupinya. Dalam hal ini, pemerintah dianggap menggunakan *technology of government* dalam menggunakan *archaeological knowledge* (Magetsari 2016). *Technology of government* berangkat dari pandangan Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan, yang mana mereka yang berkuasa menggunakan kekuatannya untuk menekankan pengetahuan yang diinginkan baik bagi kepentingan masyarakat ataupun mengontrolnya, atau juga mendayagunakan pengetahuan sebagai alat memperoleh kekuasaan. Contoh kasus dengan masalah politik *technology of government* dalam artikel ini adalah kasus pascaG/30/S 1965, ketika penulisan sejarah tidak dilakukan semaksimalnya dengan meminimalisir peran arkeologi yang mempunyai peran penting dalam pengumpulan data. Arkeolog jelas memiliki keraguan dalam bertindak berdasarkan situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka tidak bisa menjadi pengelola dan pendukung sumber daya arkeologi sekaligus menjadi juri dalam perselisihan mereka sendiri (Scarre dan Scarre 2006).

Etika dan kebijakan tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai suatu acuan yang menuntut arkeolog untuk merekonstruksi masa lalu seobjektif mungkin. Kebijakan arkeologi dalam konteks ini memiliki pengertian luas dan harus dipahami sebagai acuan bagaimana arkeolog seharusnya bertindak agar publik dapat memperoleh manfaat dari keberadaan arkeologi. Di sini, muncul sebuah kontradiksi yang membuat arkeolog harus mengkritisi kebijakannya sendiri. Kontradiksi ini muncul pada pertanyaan apakah seorang arkeolog harus mempertahankan kebenaran apabila publik tidak dapat memperoleh manfaat dari kebenaran itu? Dari pertanyaan ini dapat dipahami bahwa etika maupun kebijakan arkeologi dengan cepat menjadi pedang bermata dua bagi arkeologi itu sendiri. Kontradiksi ini

menjadi sangat nyata manakala arkeologi diminta untuk bersuara pada kasus-kasus yang menjadi bagian dari sejarah gelap Indonesia seperti pembantaian serta konflik pasca peristiwa G/30/S di tahun 1965. Kontradiksi yang ada akan menjadi permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini. Selain itu, tulisan ini akan menelaah sejauh mana arkeologi di Indonesia dapat merespons tuntutan etika akademik untuk mengambil peran dalam upaya menyusun sejarah kebudayaan kontemporer di Indonesia serta menelusuri alasan arkeologi Indonesia yang sejauh ini kurang aktif dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini.

Sejauh ini, penelitian yang telah dilakukan berpusat pada penelitian sejarah. Penelitian yang ada mayoritas merupakan upaya untuk menyusun narasi alternatif dari sejarah umum yang telah dipahami masyarakat luas secara akademis. Acuan akademis sebagai argumen utama dalam menyusun narasi yang baru dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori sosial yang telah ada dalam konteks peristiwa pascaG/30/S maupun menelaah ulang periode sejarah yang ada secara intensif dan dengan perspektif yang baru. Contoh dari penelitian dengan menggunakan teori-teori sosial adalah penerapan Teori Kambing Hitam oleh Rene Girard terhadap pengkambinghitaman PKI dalam tragedi pascaG/30/S (Werdinggar 2015) dan pemanfaatan teori gender serta teori hubungan sosial dalam meneliti fitnah yang berkaitan dengan seksualitas seseorang pada saat kekerasan terjadi (Wieringa 2011). Adapun contoh dari penelaahan ulang berdasarkan perspektif baru adalah penelitian tentang perkembangan PKI dalam kaitannya dengan pemberontakan dan pergantian pemerintah antara 1950-1966 (Wijadmi 1998). Penelitian lain yang marak dilakukan juga terfokus pada pengungkapan fakta-fakta tentang kekerasan pascaG/30/S terutama dalam skala regional seperti penelusuran adanya kolaborasi dalam pembunuhan massal di suatu desa di Jawa Timur (Leksana 2021). Penelitian mengenai peristiwa pascaG/30/S juga dilakukan untuk merekonstruksi penyebab meletusnya konflik skala luas berdasarkan penelusuran arsip dari luar negeri seperti Rusia dan Jerman (Boden 2007). Penelitian sejenis ini menandakan besarnya niat masyarakat luas untuk mengetahui fakta-fakta yang menjadi

penyebab meletusnya salah satu konflik sosial terbesar di Indonesia.

Mempertimbangkan penelitian terdahulu dan argumen lain yang telah disampaikan sebelumnya, dirumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah arkeolog Indonesia mengambil peran dalam kasus konflik pascaG/30/S? (2) apakah etika dan kebijakan arkeologi menjadi pembatas keterlibatan arkeolog dalam kasus ini? (3) Bagaimana kebijakan dan etika arkeologi di luar negeri menanggapi kasus serupa? Penelitian ini bertujuan untuk memelopori sebuah analisis dasar dalam menjawab sebab dan akibat dari ketidadaan penelitian arkeologi terkait konflik pascaG/30/S dalam konteks keterkaitannya dengan etika dan kebijakan arkeologi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuka wawasan lebih lanjut tentang tindakan yang seharusnya diambil arkeolog Indonesia dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap publik dan dunia akademik beserta dilema yang harus dihadapi arkeologi Indonesia dalam memenuhi kewajiban itu sendiri dengan melihat contoh kasus serupa di luar negeri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan yang berdasar pada teks dan data gambar yang diolah dengan metode analisis yang disesuaikan dengan data yang diperoleh (Creswel 2013). Dalam menganalisis data yang diperoleh penelitian kualitatif menjelaskan bagaimana data tersebut dipresentasikan, diinterpretasikan, divalidasi, dan mengindikasikan hasil yang potensial dari penelitian yang dilakukan (Creswel 2013). Penelitian kualitatif memiliki 8 karakteristik yang juga tercerminkan dalam penelitian ini. Kedelapan karakteristik tersebut adalah *natural setting*, *researcher as key instrument*, *multiple sources of data*, *inductive and deductive data analysis*, *participants meanings*, *emergent design*, *reflexivity*, dan *holistic account* (Creswel 2013).

Analisis yang dilakukan adalah pada fenomena-fenomena respons arkeologi sejauh ini terhadap kasus kekerasan pascaG/30/S 1965 dan kaitannya dengan etika yang dipegang teguh oleh

arkeolog Indonesia. Pendekatan kualitatif dapat didefinisikan sebagai pendekatan untuk menelusuri dan memahami arti individu atau kelompok dalam suatu permasalahan sosial atau humaniora (Creswel 2013). Hal ini berkaitan dengan sifat penalaran induktif penelitian untuk menyusun suatu teori, sementara penggunaan metode kuantitatif digunakan untuk menguji teori yang objektif (Creswel 2013) dipandang kurang relevan dengan pola penalaran induktif yang digunakan.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian ini dipilih karena dianggap sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan metode ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik dokumentasi yang berupa pengumpulan artikel, buku, dan skripsi yang dianggap relevan untuk menjawab rumusan masalah. Pengumpulan sumber dilakukan dengan fokus pada topik-topik yang berkaitan dengan etika arkeologi terutama dalam konteks arkeologi kontemporer dan arkeologi pascakolonial atau *post colonial archaeology* mengingat studi kasus yang dilakukan termasuk dalam kajian arkeologi ini. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan analisis konten dari sumber-sumber yang telah diperoleh yang kemudian dilakukan kajian pustaka untuk menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan. Selanjutnya, interpretasi dipaparkan dengan menggunakan dukungan sumber-sumber yang berbeda yang didasarkan pada relevansi masing-masing dalam menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Arkeologi dalam Konflik PascaG/30/S 1965

Narasi sejarah nasional sejauh ini selalu menempatkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang membawa kekacauan pada tahun 1960-an. Puncaknya, pada malam 30 September tahun 1965, beberapa perwira tinggi angkatan darat dibunuh oleh PKI sehingga militer Indonesia terpaksa mengambil tindakan keras dalam bentuk pembubaran PKI. Historiografi nasional Indonesia selalu menggarisbawahi tindakan kejam yang dilakukan PKI terhadap segelintir perwira tinggi Angkatan Darat tetapi gagal melihat respons hebat masyarakat dan militer dalam menghabisi PKI serta

simpatisannya dengan dalil pencegahan dari upaya PKI untuk melakukan pembantaian yang sama (Roosa, Ratih, dan Farid 2004). Dalih lain terjadinya konflik yang tidak terkendali ini adalah tindakan TNI Angkatan Darat dan berbagai elemen masyarakat sebagai pembalasan dendam terhadap kematian para petinggi angkatan darat di Jakarta pada malam 30 September 1965 (Robinson 2018). Dalih kedua ini didukung oleh dua bukti. Pertama, adanya pola dan alur kronologis konflik dari barat ke timur yang secara berurutan pertama kali terjadi di Aceh pada Oktober hingga November 1965 dan berakhir di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jangka waktu konflik antara Februari hingga Maret 1966 (Robinson 2018). Kedua, adanya dokumen-dokumen internal dari pihak militer yang menjelaskan keterlibatan militer di Aceh dalam proses kekerasan yang terjadi (Melvin 2018).

Tidak terdapat angka pasti yang menjelaskan jumlah korban akibat respons ekstrim masyarakat luas terhadap PKI. Tafsiran sejauh ini menunjukkan bahwa konflik pascaperistiwa G/30/S 1965 yang berlangsung antara Oktober 1965 hingga Maret 1966 diduga menimbulkan korban jiwa sebesar 500.000 jiwa (Cribb 2001). Akan tetapi jumlah ini tampaknya jauh lebih kecil daripada kenyataan mengingat tafsiran jumlah korban dari provinsi Jawa Timur saja diperkirakan berjumlah 150.000 jiwa (Roosa 2020). Selain pembunuhan, konflik ini menyebabkan 1,5 juta masyarakat Indonesia ditahan secara paksa dan ditafsirkan bahwa ratusan ribu dari tahanan ini telah mengalami penyiksaan (Roosa 2020).

Narasi sejarah dan historiografi nasional masih terkesan mengecilkan atau tidak menonjolkan konflik besar yang berakhir pada banyaknya korban jiwa. Pengkerdilan peristiwa ini terbukti dengan adanya penolakan terhadap narasi sejarah yang telah ada dengan membangun narasi-narasi baru yang kontradiktif (Eickhoff, van Klinken, dan Robinson 2017). Pengkerdilan peristiwa konflik pascaperistiwa G/30/S juga terlihat pada fakta bahwa prakondisi penyebab konflik meluas itu sendiri acap kali tidak dihiraukan dalam sejarah Indonesia membuat dekade 1950-1960an. Hal ini membuat sejarah Indonesia semakin kabur atau memang sengaja dikaburkan melalui pembatasan dan tekanan (Hearman 2013). Di sini, sejarah muncul sebagai suatu topik dan bahasan diskursus yang sengaja dilupakan atau harus dilupakan.

Dalam hal ini, narasi resmi pemerintahan menjelaskan bahwa konflik G/30/S merupakan sebuah konflik spontan dari masyarakat yang tidak terbandung akibat luapan emosi atas tindakan PKI dalam membunuh para petinggi Angkatan Darat (Robinson 2018). Dalam konteks ini, buku-buku historiografi nasional seperti buku *Indonesia dalam arus sejarah* hanya menggarisbawahi peristiwa politik yang terjadi di Jakarta tanpa menyinggung adanya konflik di wilayah rural Indonesia. Terlepas dari pembuktian fakta sejarah yang saat ini masih diperdebatkan, tulisan ini tidak akan fokus mencari dan mengumpulkan fakta yang ada secara arkeologis tetapi hanya akan membahas sejauh mana arkeologi dan etikanya dapat berperan maupun bertindak dalam diskursus yang berkembang di masyarakat.

Sejauh ini, beberapa sejarawan dan golongan tertentu dari masyarakat telah berupaya untuk mengungkapkan sejarah kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia dengan penggunaan sejarah lisan sebagai metode utama untuk mengolah dan menyusun sebuah narasi baru yang lebih faktual (Hearman 2009). Sayangnya, arkeologi yang sejatinya dapat mengambil peran dalam upaya ini tampaknya enggan untuk bergerak. Salah satu kasus yang menjadi bukti keengganan arkeologi untuk terlibat dalam upaya ini adalah tidak adanya arkeolog yang terlibat dalam ekskavasi terhadap kuburan masal konflik pascaperistiwa G/30/S di Wonosobo pada tahun 2000 (Gambar 1). Penggalian kuburan masal di Wonosobo dilakukan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 atau YPKP yang didirikan oleh Sulami, Pramodya Ananta Toer, dan Umar Said pada tahun 1999 (Kammen dan McGregor 2012). Ekskavasi ini juga melibatkan sosialisasi dan edukasi yang intens dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo dan masyarakat sekitar sehingga berhasil memperoleh dukungan bahkan dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang menugaskan Ansor untuk mengawal penggalian ini (Kammen dan McGregor 2012). Ekskavasi yang dilakukan oleh yayasan ini juga melibatkan ahli forensik dari Universitas Indonesia dan berhasil mengidentifikasi beberapa korban untuk kemudian dikubur ulang dengan seremoni dan cara yang layak (Kammen dan McGregor 2012).

Sumber: Kammen, Douglas, dan Katharine McGregor. 2012. "Introduction: The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965--68." Hal. 1-24 in *The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965--68*. Honolulu: Asian Studies Association of Australia in association with University of Hawaii. Hlm. 241.

Gambar 1 Salah satu ahli forensik saat melakukan pembersihan kerangka manusia pada ekskavasi di Wonosobo pada tahun 2000

Tentunya tanpa keterlibatan arkeolog maka data yang diperoleh tidaklah optimal untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan manusia, khususnya sejarah pascaperistiwa G/30/S 1965. Ekskavasi merupakan ciri khas dari kerja arkeologi dan menjadi salah satu metode utama yang membedakannya dengan ilmu lainnya, seperti sejarah. Ekskavasi untuk rekonstruksi kebudayaan masa lampau yang dilakukan tanpa adanya campur tangan arkeolog tentu akan menyebabkan tidak optimalnya perolehan dan pencatatan data. Tidak optimalnya perolehan data yang dimaksud adalah hilangnya data seputar konteks, *provenance*, asosiasi, dan matriks yang tidak lagi dapat diperoleh karena telah teraduknya konteks arkeologi. Selain itu, ilmu arkeologi telah dibekali dengan manajemen konflik terhadap tinggalan budaya yang umumnya tidak dimiliki oleh bidang ilmu lainnya dan seharusnya dapat bermanfaat terutama dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas selama ekskavasi dilakukan.

Di Indonesia, arkeologi mempunyai suara yang cukup besar dalam penyusunan historiografi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keterlibatan arkeolog dalam penyusunan historiografi nasional Indonesia yang di dalamnya terkandung narasi

tentang sejarah nasional seperti dalam *Sejarah Nasional Indonesia* jilid 1 dan 2 maupun *Indonesia dalam Arus Sejarah* jilid 1 dan 2. Keterlibatan arkeologi dalam penyusunan historiografi Indonesia sejauh ini hanya terpusat pada periode di mana data sejarah kurang mumpuni untuk merekonstruksi masa lalu. Batasan ini bahkan ditegaskan sebagai "perjanjian tidak tertulis" di Indonesia yang menyatakan bahwa periode pra1500 M merupakan ranah arkeologi sementara periode pasca1500 M merupakan ranah kajian ilmu sejarah (Kuntowijoyo 2013).

Kendati kurang logis karena menyamakan objek kajian arkeologi dengan cagar budaya, beberapa batasan objek kajian arkeologi juga didasarkan dari pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa cagar budaya berusia minimal 50 tahun atau lebih dan/atau memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Mengingat peristiwa konflik pascaperistiwa G/30/S 1965 telah berusia 50 tahun pada tahun 2015, maka batasan ini semakin tidak relevan sebagai dalil. Batasan-batasan semacam inilah yang menjadi salah satu dalil bagi arkeolog Indonesia untuk tidak terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang terlalu kontemporer dan sekiranya dapat diselesaikan dengan data-data dan metode sejarah. Selain itu keterbatasan arkeologi forensik di Indonesia juga menjadi alasan logis kurangnya keterlibatan arkeologi dalam merespons konflik pascaperistiwa G/30/S 1965. Hal ini mempertimbangkan bahwa arkeologi forensik adalah penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik arkeologis dalam penyelesaian masalah-masalah *medico-legal*, yaitu masalah yang berkaitan dengan aspek medis dan hukum (Suriyanto 2016). Di Indonesia sendiri, penyelidikan arkeologi forensik sepenuhnya masih dilakukan oleh ahli antropologi biologis (Suriyanto 2016). Hal ini membuat arkeologi semakin menarik diri untuk mengeluarkan kebijakan terkait konflik pascaperistiwa G/30/S 1965 akibat kurangnya pengetahuan dan tenaga kerja yang mumpuni dalam perspektif arkeologi forensik.

Kebijakan arkeologi di Indonesia yang saat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga tidak memberikan kejelasan terkait respons ideal

terhadap konflik pascaG/30/S 1965. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan bahwa suatu warisan budaya kebendaan atau dalam hal ini tinggalan maupun objek kajian arkeologi dapat dijadikan suatu cagar budaya apabila dipandang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, pendidikan, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan cagar budaya. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah pemaknaan nilai penting dari tinggalan arkeologis dari konflik pascaperistiwa G/30/S 1965 atau dalam hal ini adalah kuburan masal sebagai tinggalan yang paling signifikan. Dari perspektif sejarah, nilai penting yang terkandung dari kuburan masal ini sangatlah kontroversial mengingat kuburan masal yang ada merupakan bukti nyata salah satu konflik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Kontroversi ini semakin parah manakala pemerintah sebagai pembuat kebijakan itu sendiri terlibat secara langsung sebagai provokator dan inisiator dari konflik pascaG/30/S 1965 (Melvin 2018). Di sini, suara dan pandangan arkeologi sangatlah krusial mengingat arkeologi merupakan ilmu yang paling berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam kedudukannya sebagai kebijakan semata maupun sebagai dasar legal dari tindakan dan proses kerja arkeologi di Indonesia.

Etika dan Kebijakan Arkeologi dalam Konteks Konflik Politik Kontemporer

Post-colonial archaeology dapat dipahami sebagai kajian arkeologi yang merupakan kritik terhadap kolonialisme, budaya Eropa serta sistem pemikiran barat dengan "keterasingan" dalam kajian arkeologi dan secara periodisasi dimulai pada saat pascaPerang Dunia II atau berakhirnya periode imperialisme di dunia (Lydon 2016). *Post-colonial archaeology* melihat posisi arkeologi pada masa kini dengan dua perspektif, yaitu untuk meneliti dampak kolonialisme pada masa lalu suatu masyarakat dan perspektif kepentingan atau intervensi masa lalu untuk masa kini. Berdasarkan perspektif kedua diperlukan etika penelitian baru yang menyangkut rekonstruksi warisan masa lalu dengan dampak nyata pada masyarakat kontemporer, kritik terhadap neo-kolonialisme, serta beberapa permasalahan mengenai keadilan sosial (Lydon 2016). Salah satu bidang yang mengembangkan etika baru dalam *post-colonial*

archaeology adalah penelitian-penelitian dengan tema *cosmopolitant archaeology* di mana peran etik dan tanggung jawab moral sangat ditekankan (Lydon 2016). Secara umum, *post-colonial archaeology* menekankan pentingnya etika sebagai salah satu upaya untuk mengkritik narasi kolonialisme dengan pendekatan arkeologi dan menggarisbawahi pentingnya evaluasi etika arkeologi oleh praktisi arkeologi sebagai upaya dalam membedah narasi kolonialisme (Lydon 2016).

Dalam kasus pascaG/30/S 1965, *post-colonial archaeology* dapat digunakan untuk menekankan penggunaan etika sebagai sarana atau beban moral maupun penggunaan kebijakan sebagai dasar gerak atau acuan untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan perspektif, pendekatan, dan metode pengumpulan data, maupun pengolahan data secara arkeologis. Akan tetapi, di Indonesia *post-colonial archaeology* selalu difokuskan sebagai kajian untuk menolak narasi propaganda kolonialisme baik dalam ranah sebagai bentuk kebanggaan suatu koloni bagi negara induk di Eropa maupun sebagai alat untuk merepresi serta mengkotak-kotakkan kelas non-Eropa. *Post-colonial archaeology* di Indonesia lebih terfokus pada kajian tentang pembenaran hal-hal dan permasalahan yang telah dibelokkan dalam narasi-narasi bangsa barat terhadap historiografi Indonesia daripada penyusunan suatu narasi periode baru dari perspektif kajian arkeologi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena adanya keengganan untuk melibatkan arkeologi dalam permasalahan kontemporer karena rentannya pemanfaatan arkeologi sebagai sarana propaganda identitas dan kebanggaan koloni seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap Indonesia sebagai koloni.

Dalam beberapa kasus, arkeologi juga menunjukkan keengganannya dalam pemanfaatan data atau metode arkeologi untuk menyelesaikan permasalahan politik praktis maupun hal-hal yang berkaitan dengan konflik ideologi seperti kasus Masjid di Ayodhya, India (Scarre dan Scarre 2006). Kendati tidak dibenarkan secara etika yang dibangun dari perspektif *post-colonialism archaeology*, harus diakui bahwa arkeologi tidak dapat secara bersamaan menjadi advokat terhadap data arkeologis sekaligus menjadi juri dalam suatu konflik yang menyangkut data arkeologis (Scarre

dan Scarre 2006). Akan tetapi, hal ini tidak mengalihkan fakta bahwa arkeolog dan sejarawan merupakan representasi masa lalu pada masyarakat masa kini sehingga kedua profesi ini memiliki tanggung jawab terhadap masa lalu sekaligus berkedudukan sebagai advokat terhadap masyarakat masa lampau atau *past people* (Scarre dan Scarre 2006). Di sini, arkeolog tidak hanya dituntut menjadi pihak dengan kedudukan netral dalam menilai dan merekonstruksi peristiwa yang didasarkan pada metode arkeologi tetapi menjadi interpretator sekaligus mediator yang menjelaskan fakta-fakta tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau.

Dalam menjawab keengganan arkeologi untuk berkomentar pada permasalahan sejenis konflik pascaG/30/S, harus dilihat kedudukan arkeologi dalam ranah kontemporer sehingga di sini kajian arkeologi kontemporer perlu dipertimbangkan. Arkeologi kontemporer merupakan periode kajian arkeologi yang dimulai sekitar abad ke-20 Masehi dan memiliki ciri khas fenomena material yang spesifik dengan penekanan tidak hanya pada perspektif pemahaman arkeologi masa kini sebagai suatu tahapan atau periode tertentu dalam arkeologi tetapi sebagai upaya untuk memikirkan kembali teori dan praktik arkeologi (González-Ruibal 2018). Perlu ditegaskan bahwa era kontemporer memiliki temporalitas yang unik sehingga arkeologi kontemporer dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan etika maupun kebijakan arkeologi dengan dinamika masyarakat kontemporer (González-Ruibal 2018).

Kendati demikian, etika maupun kebijakan memainkan peran penting dalam arkeologi kontemporer dan tidak dapat secara sederhana dihindari mengingat keduanya bersifat dinamis dan berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat pada masa kini terhadap arkeologi dan permasalahan terkait dengan masyarakat kontemporer yang dapat dijawab dengan pendekatan arkeologis (González-Ruibal 2018). Etika dan kebijakan arkeologi dalam konteks ini harus menjadi acuan bagi arkeolog untuk bertindak bahkan ketika berhadapan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lampau. Hal ini disebabkan karena etika arkeologi tidak tunduk pada keterbatasan kronologis terhadap masa lalu dan didasarkan pada komitmen moral

terhadap masa lalu, sehingga arkeologi sendiri dapat mengaburkan relevansi kronologis suatu permasalahan atau *temporal hierarchies of care* (González-Ruibal 2018).

Perkembangan ilmu arkeologi secara internasional menunjukkan adanya pengaruh kuat untuk mempertahankan etika dan moralitas arkeologi sebagai ilmu yang menunjukkan atau mengungkapkan kebenaran dengan lebih profesional. Perwujudan etika arkeologi di Indonesia dikukuhkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh para arkeolog meskipun kebijakan ini harus diakui sedikit banyak membutuhkan legalitas subjektif dari pemerintah. Di Indonesia, pandangan ini menjadi tantangan untuk dipraktikkan dalam kasus konflik pascaG/30/S 1965. Metode dan pendekatan arkeologi dalam kasus ini sangat diperlukan untuk membantu penyusunan sejarah kebudayaan sebagaimana telah diamanatkan dalam paradigma ilmu arkeologi sendiri. Sayangnya, etika arkeologi dalam kasus ini tidak menjadi motivasi atau tuntutan tanggung jawab moral yang dipegang teguh arkeolog dalam menyikapi dan menyumbangkan perspektif lewat disiplin ilmunya untuk mengungkapkan kebenaran dari konflik berdarah ini. Etika di sini justru menjadi penarik arkeologi (khususnya etika arkeologi) untuk bertindak atas dasar pertimbangan dampak dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat terkait pengungkapan kebenaran jika arkeologi benar-benar memutuskan untuk terlibat di dalamnya.

Sikap arkeolog yang menarik diri atas pentingnya peran mereka, khususnya pada kasus G/30/S 1965 ini mempengaruhi hasil penelitian yang telah ada. Ketakutan akan keluar dari garis aman dan menodai nama baik arkeologi, bukan berarti arkeolog harus menutup mata terhadap kasus-kasus seperti ini walaupun kebenaran yang ditemukan lebih pahit dari penelitian arkeologi pada umumnya. Peran pemerintah sebagai payung yang melindungi dan instansi yang menaungi arkeologi dianggap sangat berpengaruh terhadap tindakan dan hasil yang subjektif. Pemerintah, baik daerah maupun pusat, tentunya memiliki kekuasaan khususnya dalam pemberian perizinan kegiatan atas tindakan arkeologi. Kekuasaan dimaksudkan sebagai kekuatan atau kewenangan suatu pihak dalam mengontrol tingkah laku suatu kelompok (Paramita 2011)

Arkeolog tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam kasus ini mengingat arkeologi di Indonesia mayoritas berada di bawah naungan dan pendanaan pemerintah. Hal ini tidak hanya menjadi kritik bagi Arkeologi Indonesia untuk mengembangkan sektor swasta yang lebih objektif. Arkeologi Indonesia sebagai suatu ilmu juga dituntut agar dapat melangkah dengan mengikuti etika yang telah dibuat, meluruskan kontradiksi yang ada pada etika itu sendiri, dan mengikuti prinsip-prinsip kerja arkeologi secara konsekuen terutama di era kontemporer ini. Arkeolog harus mampu menegaskan kembali kredibilitas dan objektivitas mereka dalam melakukan pekerjaannya meskipun perlu digarisbawahi bahwa arkeologi layaknya ilmu sosial-humaniora lainnya tidak dapat menjadi objektif sepenuhnya tetapi memiliki kewajiban untuk memperkecil subjektivitas yang ada. Jika upaya ini berhasil dilakukan maka publik akan mengapresiasi arkeologi atas pemenuhan tanggung jawab mereka terhadap disiplin ilmu yang menuntut integritas sekaligus tetap menjaga nama baik arkeologi, walaupun tidak semua masyarakat dapat menerima hasil yang sebenarnya sehingga arkeologi perlu menjadi advokat dalam publikasinya sendiri.

Dalam konteks arkeologi kontemporer, arkeologi diposisikan sebagai ilmu yang membuat kebenaran muncul (González-Ruibal 2018). Oleh karenanya, arkeologi memerlukan suatu "kemerdekaan" dari kepentingan masyarakat luas agar dapat mengungkapkan kebenaran tanpa penipuan (McGuire 2008). Dasar dari kemerdekaan ilmu arkeologi ini adalah tuntutan keahlian dan kewajiban seorang arkeolog terhadap komunitas arkeologi secara luas sehingga pertentangan dari pernyataan arkeologi sebagai ilmu dan pernyataan dari masyarakat luas merupakan suatu keniscayaan (McGuire 2008). Pertentangan ini tentu dimaknai secara positif dan konstruktif sehingga ilmu arkeologi tidak semata-mata diikat dengan etika yang bersifat eksternal atau berdampak bagi masyarakat tetapi etika bagi ilmu arkeologi sendiri sebagai ilmu yang membuat suatu kebenaran muncul atau pemberi bukti fisik.

Dalam kasus konflik pascaG/30/S 1965, etika arkeologi bagi ilmunya sendiri maupun masyarakat luas dapat menjadi dasar untuk melakukan tindakan *disclosure* atau penyingkapan kebenaran. Tindakan *disclosure* ini umumnya

dilakukan dengan ekskavasi atau penggalian meskipun kritik semakin berkembang untuk menerapkan metode non-invasif seperti *Geographic Information System* (GIS) dan lain sebagainya (González-Ruibal 2018). Sistem Informasi Geografis dalam arkeologi memang menjadi pilihan arkeolog dalam mengikuti perkembangan dunia untuk mengambil data secara luas dan tidak 'mengganggu' lokasi secara langsung (Mujabuddawat 2016), namun metode ini masih membutuhkan pembuktian dengan melakukan survei ke lapangan dengan hasil penginderaan jauh sebagai pemberi data awal. *Disclosure* merupakan tindakan utama untuk mengatasi politik supermodern yang umumnya bersifat menyembunyikan dan mendistorsi sehingga arkeologi dengan kemampuannya untuk mengungkapkan kebenaran kembali ke permukaan menjadi disiplin utama untuk menentang adanya politik supermodern (González-Ruibal 2018). Beberapa tindakan *disclosure* berdasarkan pertimbangan etik yang dapat dicontoh adalah kasus ekskavasi korban perang saudara Spanyol di La Carcavilla di Palencia (Gambar 2 dan 3) dan ekskavasi pemukiman multietnik antara tahun 1910-1929 yang sengaja dihancurkan di Detroit, Amerika Serikat (González-Ruibal 2018).

Di sisi lain, kode etik ahli arkeologi Indonesia sebagai etika profesi yang telah dirumuskan IAAI, beberapa di antaranya menjadi kontradiksi tindakan arkeolog dalam merespons kasus ini, yaitu pada pasal 2 tentang tanggung jawab terhadap pemerintah.

"Seorang ahli arkeologi Indonesia harus ikut berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pembangunan nasional." (Pasal 2 ayat 1)

"Seorang ahli arkeologi Indonesia harus patuh kepada ketentuan peraturan" (Pasal 2 ayat 3)

(sumber: <https://iaai.or.id/ad/ad-art-kode-etik-dan-perundang-undangan/>)

Keberadaan pasal ini menegaskan kembali pernyataan penulis bahwa arkeologi Indonesia berada di naungan pemerintah dan harus pula menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah itu sendiri. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (sebagai kajian utama arkeologi) menyebutkan batas minimum kajian arkeologi adalah 50 tahun. Namun, kuburan masal G/30/S 1965 yang bahkan sejak tahun 2015 telah berumur

50 tahun masih belum dilirik oleh arkeologi Indonesia. Mengingat kasus G/30/S 1965 yang menjadi *highlight* tulisan ini merupakan salah satu kejadian sejarah yang cukup pahit di memori masyarakat, khususnya pemerintah yang memiliki andil yang cukup besar pada tragedi ini. Hal ini agaknya menjadi pertimbangan pemerintah dalam membatasi kerja arkeologi. Arkeologi kontemporer diperlukan dalam mengkaji masalah seperti ini, dengan menganalisis tinggalan budaya masa lalu dalam konteks masa kini untuk kepentingan saat ini. Bercermin dengan kasus Auschwitz sebagai pusat memori kelam atas NAZI, alih-alih ditinggalkan dan dilupakan justru dijadikan museum, dan bahkan sebagai tempat pembelajaran pada pengunjung yang merupakan warga dunia saat ini, bukan masa lalu. Arkeolog mungkin perlu diingatkan kembali bahwa dengan perspektif arkeologi kontemporer, tinggalan masa lampau yang menjadi hak arkeologi menjadi kajian untuk kelompok lain seperti kelompok politik, komunitas, dan sosial yang tertarik dan kemudian memberikan interpretasi berdasarkan pandangan mereka yang menghasilkan *multi-vocal* sehingga implikasinya pada etika arkeologi adalah arkeologi tidak lagi menjadi sumber pengetahuan (Marwoto-Johan 2012).

Untuk memperoleh perspektif yang lebih luas maka dilakukan perbandingan kasus yang sama dengan ilmu lain dalam konteks etika profesi sebagai batas dan wujud subjektivitas. Berdasarkan etika profesi, pandangan sejarah dalam kasus kekerasan pascaG/30/S tampak lebih mengedepankan diskursus, perdebatan, dan interpretasi masa kini sebagai suatu realitas sosial yang menyusun sejarah itu sendiri (Pohlman 2013). Di sini, arkeologi jelas tidak dapat bertahan tanpa adanya etika profesi maupun kebijakan yang secara garis besar merupakan *guideline* sebagai dasar tindakan atau pijakan dari arkeologi. Akan tetapi etika dan kebijakan yang ada harus terus dikritisi dan menunjukkan suatu perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketika pengungkapan kebenaran yang menjadi nilai penting dalam etika dan kebijakan arkeologi kontemporer tidak lagi dapat dipertahankan maka sudah saatnya arkeologi Indonesia kembali mengkritisi etikanya sendiri serta arah kebijakan yang dikeluarkannya baik dalam ranah organisatoris sebagai kumpulan ahli

arkeologi maupun dalam ranah pribadi dengan penilaian moral terkait langkah etis dalam menyingkapi konflik pascaG/30/S 1965.

Berdasarkan pembahasan antara etika arkeologi secara luas dengan etika profesi arkeologi di Indonesia dan perbandingannya dengan etika dalam ilmu sejarah ditemui suatu kontradiksi dan perbedaan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan arkeologi kontemporer dan *post-colonial archaeology* untuk mengedepankan tuntutan etika dan moral arkeologi dalam mengungkapkan fenomena kontemporer dengan perspektif dan pendekatan arkeologi yang seaktual dan sefaktual mungkin. Tuntutan etika arkeologi secara luas ini berbanding terbalik dengan etika profesi arkeologi di Indonesia yang lebih mengutamakan kesinambungan kerja arkeologi dengan pemerintahan dalam upaya pembentukan identitas bangsa yang idealis. Idealisme ini tidak jarang menjadi penarik pihak manapun yang menyusun historiografi untuk merekonstruksi masa lalu seaktual mungkin. Dalam hal ini, etika profesi dapat dipandang dalam definisi etika sebagai wajah arkeologi Indonesia yang harus dijaga kredibilitasnya bagi dan untuk masyarakat luas. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa etika arkeologi secara luas memiliki peran penting untuk mendorong keterlibatan arkeolog dalam menanggapi konflik pascaG/30/S. Namun, etika profesi arkeologi yang telah dirumuskan oleh organisasi resmi perwakilan arkeolog di Indonesia justru dalam perspektif dan pengertian tertentu menjadi penarik peranan arkeolog untuk menanggapi konflik pascaG/30/S.

Sumber: González-Ruibal, Alfredo. 2018. *An archaeology of the contemporary era*. London: Routledge. Hlm. 176.

Gambar 2 Penggalian kuburan masal Perang Saudara Spanyol, di Gunung Estepar, Burgos. Foto oleh Alvaro Minguito

Sumber: González-Ruibal, Alfredo. 2018. *An archaeology of the contemporary era*. London: Routledge. Hlm. 246-247.

Gambar 3 Kuburan masal yang kosong, terkubur 12 mayat yang dibunuh setelah Perang Saudara Spanyol. Foto oleh Alfredo Gonzales-Ruibal.

Arkeologi dalam Pusaran Konflik Politik: Melihat Jerman, Uruguay, dan Kamboja

Konflik politik bukan merupakan hal asing dalam perjalanan sejarah suatu negara. Salah satu contoh dari konflik yang menjadi bagian dari sejarah kelam suatu bangsa adalah tindakan kekejaman rezim *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* atau yang dikenal secara luas dengan rezim NAZI pimpinan Adolf Hitler di Jerman. Tinggalan-tinggalan rezim teror yang tidak hanya dianggap sebagai bagian memalukan bagi masyarakat Jerman tetapi merupakan suatu monumen akan kejahatan perang dan kebiadaban manusia seperti kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia hingga saat ini masih dapat dijumpai. Kamp konsentrasi di Auschwitz saat ini justru difungsikan sebagai museum dan monumen yang menjadi penanda dari berbagai bentuk, seperti bahaya ekstrimisme, rasialisme, propaganda politik tidak sehat, dan fanatisme politik di masyarakat luas, bahkan menjadi *focal point* memori kebencanaan yang pernah terjadi (Pettitt 2021). Kasus Auschwitz mungkin tidak dapat dipandang sebagai contoh ideal mengingat letaknya yang berada di Polandia dan adanya keterbatasan ruang gerak Jerman dalam mengatur narasi yang muncul atau dibangun dari Auschwitz.

Sumber: González-ruibal, Alfredo. 2015. *Ethics and the Archaeology of Violence*. diedit oleh A. Gonzales-Ruibal. London: Springer. Hlm.149.

Gambar 4 Dinding pit ekskavasi dengan stratifikasi di selatan kamp kerja paksa Lufthansa (bagian bawah). Foto oleh Edward Collins/Jan Trenner.

Kasus yang lebih relevan bagi Jerman dalam upaya menghadapi masa lalu yang kelam di wilayahnya sendiri berasal dari proyek ekskavasi di Bandara Tempelhof yang dilaksanakan pada tahun 2013. Bandara Tempelhof di Berlin merupakan basis dari berbagai aktivitas Angkatan udara NAZI pada masa Perang Dunia II dan telah menjadi saksi bisu serta bagian dari tindakan eksploitasi, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh rezim tersebut (González-ruibal 2015). Ekskavasi yang dilakukan di Bandara Tempelhof berpegang teguh pada pandangan Gunter Morsch yang menekankan tanggung jawab arkeolog dan siapapun yang bergerak dalam bidang preservasi sejarah untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan martabat dari korban masa lalu (González-ruibal 2015).

Sumber: González-ruibal, Alfredo. 2015. *Ethics and the Archaeology of Violence*. diedit oleh A. Gonzales-Ruibal. London: Springer. Hal: 149. González-ruibal, Alfredo. 2015. *Ethics and the Archaeology of Violence*. diedit oleh A. Gonzales-Ruibal. London: Springer.

Gambar 5 Penguburan tersembunyi dari yang ditahan atau menghilang.

Sesuai dengan pandangan ini, ekskavasi Bandara Tempelhof menekankan pendekatan *longue duree* dengan memperlakukan setiap *layer*

ekskavasi yang merepresentasikan periode tertentu secara sama ([Gambar 4](#)) dan tidak menggarisbawahi satu periode pun dari ekskavasi agar pengungkapan interpretasi dari periode tertentu yang dianggap kelam dapat diminimalisir ([Gambar 5](#)) ([González-ruibal 2015](#)). Strategi ini dapat menjadi pertimbangan ke depannya dalam mengekskavasi periode sejarah yang masih memerlukan verifikasi dengan menggunakan ekskavasi seperti kemungkinan-kemungkinan terhadap penggalian kuburan masal dari berbagai konflik di Indonesia.

Kasus yang lebih identik dengan Indonesia dapat diambil dari Uruguay di mana terjadi perdebatan etik terkait respons arkeologi dalam pencarian orang hilang dari periode diktator militer antara tahun 1960-1980. Asosiasi profesi arkeolog di Uruguay tidak pernah memberikan penjelasan resmi bagaimana mereka memposisikan diri terhadap konflik hilangnya orang-orang pascarezim diktator ([González-ruibal 2015](#)). Tindakan arkeolog Uruguay dalam mengungkap fenomena orang hilang dengan ekskavasi justru diambil oleh berbagai lembaga perguruan tinggi yang membentuk *Grupo de Investigacion en Arqueologia Forense* atau Kelompok Penelitian dalam Bidang Arkeologi Forensik pada tahun 2005 ([González-ruibal 2015](#)). Lembaga arkeologi ini bahkan mendapatkan akses penuh dan bantuan logistik dari pihak militer Uruguay meskipun kualitas informasi yang disediakan pihak militer sangat subjektif dan sangat bergantung pada individu yang berkaitan. Selain Uruguay, negara-negara Amerika Latin juga telah melakukan upaya yang sama untuk membongkar kejahatan rezim diktator. Di Argentina, dibentuk Tim Forensik Antropologi Argentina yang awalnya merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di Chili, pekerjaan ini dilakukan di bawah arahan ahli forensik negara, sementara di Brazil upaya yang sama dilakukan atas kolaborasi Angkatan Darat dengan masyarakat umum meskipun hasil ekskavasi tersebut tidak dipublikasikan ([González-ruibal 2015](#)). Lebih lanjut, upaya *disclosure* atau penyingkapan tragedi pembunuhan masal di Argentina dilakukan dengan gerakan *Nunca Mas* yang berarti Jangan Terulang Kembali atau *Never Again* ([Graham-Yooll 2005](#)).

Kamboja sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memiliki beberapa

keidentikan budaya dan sejarah dengan Indonesia. Salah satu konflik besar yang melanda Kamboja pada abad ke-20 adalah Gerakan Khmer Merah atau *Khmer Rouge* yang memakan kurang lebih satu juta korban jiwa atau satu dari delapan penduduk Kamboja diduga tewas akibat perang, kelaparan, keletihan, kesalahan diagnosa penyakit, dan eksekusi ([Chandler 1993](#)). Konflik ini menghasilkan puluhan ribu kuburan masal yang saat ini tersebar di seluruh pelosok Kamboja. Banyaknya kuburan masal di Kamboja ([Gambar 6](#) dan [7](#)) dapat dimaknai sebagai *living archaeology*. Pemaknaan *living archaeology* merupakan bentuk pengamalan nilai religius masyarakat Kamboja di mana kuburan masal merupakan tempat suci dengan kekuatan spiritual sekaligus bagian dari bumi yang menjaga jasad-jasad yang dikebumikan ([Falser dan Juneja 2013](#)). Pemaknaan dari perspektif ini masih dihidupi dan dijaga oleh masyarakat rural Kamboja sementara pemanfaatan kuburan masal sebagai monumen politik lewat seremoni-seremoni kenegaraan perlahan mulai ditinggalkan sejak awal 1990-an.

Sumber: Dokumentasi Pribadi

[Gambar 6](#) Eksterior monumen konflik Khmer Merah di Choeung Ek Genocidal Center

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, tahapan pertama sekaligus tahap terpenting yang harus dilalui Indonesia untuk menegakkan etika arkeologi yang lebih baik adalah penyingkapan atau *disclosure* bahwa konflik pascaG/30/S benar-benar terjadi

sebagaimana telah dibahas sesuai pandangan (González-Ruibal 2018) dan mengakui hasil penyingkapan tersebut sebagai suatu fakta. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, mengingat banyaknya kepentingan dan dinamika politik Indonesia di era kontemporer (Cribb 2002). Pengamatan pada kasus-kasus yang telah diajukan menunjukkan bahwa diskusi dan penelitian lebih intensif hanya bisa dilakukan saat masyarakat kontemporer secara luas menerima konflik kelam di masa lalu sebagai sebuah fakta. Akan tetapi, etika arkeologi di Indonesia harus kembali pada prinsip-prinsip dasar paradigma arkeologi tentang penyusunan sejarah kebudayaan seobjektif mungkin termasuk menerima konflik sebagai bagian dari dinamika sosial-budaya masyarakat secara luas.

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 7 Interior Monumen Konflik Khmer Merah di Choeung Ek Genocidal Center, dimana ribuan tengkorak dikumpulkan dalam suatu gedung peringatan.

PENUTUP

Arkeolog di Indonesia sejauh ini belum menunjukkan peranan yang signifikan dalam penyelesaian konflik pascaG/30/S. Bahkan keterlibatan arkeolog dalam ekskavasi untuk mengkaji forensik dirasa masih kurang. Hal ini menjadikan ilmu sejarah justru menggantikan peranan arkeolog dalam melaksanakan ekskavasi sebagai bentuk respons untuk memberikan solusi terhadap peristiwa konflik pascaG/30/S. Hal ini sangat disayangkan mengingat ekskavasi tinggalan budaya manusia di masa lampau merupakan metode yang menjadi identitas ilmu arkeologi sehingga kontribusinya terhadap kasus ini sangatlah dibutuhkan.

Di lain sisi, arkeologi di Indonesia juga dihadapkan dengan suatu kontradiksi besar antara etika arkeologi secara luas dan etika profesi yang diatur dalam kode etik ahli arkeologi Indonesia. Etika arkeologi secara luas terutama dalam konteks arkeologi kontemporer dan *post-colonial archaeology*. Dualisme interpretasi dari etika arkeologi dan etika profesi arkeologi ini menyebabkan peranan arkeologi Indonesia dalam menjawab atau merespons penyelesaian konflik pascaG/30/S semakin bias dan tidak terarah. Etika arkeologi secara luas menuntut peran dan keterlibatan arkeologi tidak hanya dalam tahapan pengungkapan masa lalu seaktual mungkin tetapi hingga pada tahap penyingkapan atau *disclosure*. Di sisi lain, etika profesi ahli arkeologi Indonesia memiliki pasal-pasal multitafsir yang seakan mengutamakan kredibilitas, yang juga mempertimbangkan konsep pemahaman dan perspektif masyarakat yang secara akademis sering terbukti bias dan tidak faktual. Pertimbangan ini dan sifat multitafsir dari kode etik profesi ahli arkeologi Indonesia menjadi pembatas terlibatnya arkeolog dalam penyelesaian konflik pascaG/30/S.

Etika profesi maupun kebijakan arkeologi di Indonesia secara akademis dan praktis dituntut untuk menjalankan fungsinya sebagai acuan dan dasar tindakan dalam paradigma yang bertujuan untuk menyusun sejarah kebudayaan sesuai dengan fakta dan realita masa lampau. Dalam konteks ini, dipahami bahwa kebijakan yang menyangkut ilmu arkeologi tentunya diambil dari konsep hubungan arkeologi dengan masyarakat di mana arkeologi sendiri ada dari, oleh, dan untuk masyarakat. Akan tetapi, kebijakan arkeologi di Indonesia sejauh ini tidak memberikan suatu kejelasan atau acuan akan bagaimana arkeologi seharusnya bertindak pada konflik-konflik masa lalu yang berada dalam periode kontemporer. Arkeologi Indonesia masih memegang teguh pembatasan periode kajiannya sebagai salah satu dalih untuk tidak terlalu ikut campur (atau bahkan tidak bersuara sama sekali) dengan apa yang seharusnya menjadi objek kajian sejarah di saat negara-negara lain bahkan negara berkembang seperti Uruguay dan Kamboja telah menerjunkan para arkeolog dengan ilmu serta metode yang mereka kuasai untuk menyelesaikan atau setidaknya bersuara terhadap konflik politik di era kontemporer.

Ke depannya, diperlukan sebuah kejelasan dalam bentuk pernyataan sikap terhadap landasan hukum formal maupun informal yang berkaitan dengan ilmu arkeologi terkait bagaimana arkeologi harus mempertahankan kredibilitasnya dalam rangka memasuki ranah kontemporer untuk menjawab permasalahan-permasalahan etika seperti dalam kasus konflik pascaG/30/S 1965. Terlepas dari berbagai kekurangan yang telah dijelaskan sebelumnya, arkeologi Indonesia harus memiliki konsistensi dalam menafsirkan kebijakan yang dimiliki saat ini untuk menjawab permasalahan konflik pascaG/30/S 1965. Dasar hukum dan kebijakan yang ada tidak melarang penetapan kuburan masal korban konflik sebagai sebuah cagar budaya, oleh karenanya arkeolog dan ahli arkeologi memiliki kesempatan untuk mengajukan tinggalkan dengan nilai sejarah kontemporer yang teramat penting ini sebagai sebuah cagar budaya. Kendati dalam urusan politik hal ini tidak dapat diterima dan kemungkinan besar ditolak, setidaknya ilmu arkeologi dan para praktisi di Indonesia telah memiliki kejelasan terkait sikapnya terhadap fenomena konflik pascaG/30/S 1965. Dengan kata lain, setidaknya tindakan ini menjadi langkah awal yang secara simbolis menunjukkan konsistensi sikap dari kebijakan dan etika arkeologi di Indonesia terhadap kasus sejenis ini.

Konsistensi ini terbukti krusial dalam mewujudkan etika arkeologi yang lebih kredibel dalam konteks etika arkeologi Jerman, Uruguay,

dan Kamboja. Dalam hal ini, etika arkeologi yang mewujudkan tanggung jawab arkeolog sebagai profesi terhadap ilmu mereka dimulai dengan adanya pengakuan dari hasil *disclosure* atau penyingkapan bahwa konflik kontemporer merupakan bagian dari dinamika budaya masyarakat di masa lampau. Terlepas dari perbedaan kedudukan dan situasi kondisi politik bagaimana masyarakat masa kini memandang konflik politik masa lampau, pengakuan bahwa konflik yang terjadi merupakan suatu fakta menjadi langkah awal dilakukannya *disclosure* untuk melakukan diskusi lebih mendalam. Keterlibatan arkeologi dalam diskusi itu sendiri merupakan perwujudan pengamalan etika arkeologi yang tidak dibatasi dengan kebijakan dan etika profesi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan artikel ini terutama kepada Drs. Winston Sam Dauglas Mambo. Penulis juga berterimakasih kepada Dr. Daud Aris Tanudirdjo yang telah menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian singkat ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Prima Sabrina Ndaru Lestari yang telah memberikan saran dalam aspek kebahasaan pada tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beaudry, Mary C. 2009. "Ethical Issues in Historical Archaeology." in *International Handbook of Historical Archaeology*. New York: Springer.
- Boden, Ragna. 2007. "The 'Gestapu' Events of 1965 in Indonesia: New Evidence from Russian and German Archives." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 163(4):507–28.
- Creswel, John. W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication.
- Cribb, Robert. 2001. "Genocide in Indonesia, 1965-1966." *Journal of Genocide Research* 3(2):219–39. doi: 10.1080/713677655.
- Cribb, Robert. 2002. "Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966." *Asian Survey* 42(4):550–63. doi: 10.1525/as.2002.42.4.550.
- Eickhoff, Martijn, Gerry van Klinken, dan Geoffrey Robinson. 2017. "1965 Today: Living with the Indonesian Massacres." *Journal of Genocide Research* 19(4):449–64. doi: 10.1080/14623528.2017.1393931.
- Falser, Michael, dan Monica Juneja. 2013. "Archaeologizing" *Heritage - Transcultural Entanglements between Local Social Practice and Global Virtual Realities*. diedit oleh M. Herren, A. Michaels, dan R. G. Wagner. New

- York: Springer.
- González-ruibal, Alfredo. 2015. *Ethics and the Archaeology of Violence*. diedit oleh A. Gonzales-Ruibal. London: Springer.
- González-Ruibal, Alfredo. 2018. *An archaeology of the contemporary era*. London: Routledge.
- Graham-Yooll, Andrew. 2005. "The Pain and The Memory: The Legacy of Nunca Más." *Index on Censorship* 34(1):62–66. doi: 10.1080/03064220512331339490.
- Hearman, Vannessa. 2009. "The Uses of Memoirs and Oral History Works in Researching the 1965-1966 Political Violence in Indonesia." *International Journal of Asia Pacific Studies (IJAPS)* 5(1):21–42.
- Hearman, Vannessa. 2013. "Suppressing and Recovering Memories of the Indonesian Sixties." *Social Transformation* 1(1):5–25.
- Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. "Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia". Diakses pada 25 Februari 2021 (<https://iaai.or.id/ad/ad-art-kode-etik-dan-perundang-undangan/>). (web)
- Kammen, Douglas, dan Katharine McGregor. 2012. "Introduction: The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965–68." Hal. 1–24 in *The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965–68*. Honolulu: Asian Studies Association of Australia in association with University of Hawaii.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leksana, Grace. 2021. "Collaboration in Mass Violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist Mass Killings in 1965–66 in East Java." *Journal of Genocide Research* 23(1):58–80. doi: 10.1080/14623528.2020.1778612.
- Lydon, Jane. 2016. *Handbook of Postcolonial Archaeology*. California: Left Coast Press.
- Lynott, Mark J. 1997. *Ethics in Archaeology*. New York: Archaeological Institute of America.
- Magetsari, Noerhadi. 2016. *Perspektif Arkeologi Masa Kini Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Marwoto-Johan, Irmawati. 2012. "Arkeologi Menurut Interpretasi Siapa?" *Public History Review* 19(2012):111–21.
- McGuire, Randall H. 2008. *Archaeology as Political Action*. California: University of California Press.
- Melvin, Jess. 2018. *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder*. New York: Routledge.
- Mujabuddawat, Muhammad Al. 2016. "Geographic Information System(GIS) in Research and Presentation of Information Archaeology." *Kapata Arkeologi* 12(1):29–42.
- Paramita, Patricia Dhiana. 2011. "Keterkaitan Antara Politik dan Kekuasaan dalam Organisasi." *Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran* 9(21):1–13.
- Pettitt, Joanne. 2021. "Introduction: new perspectives on Auschwitz." *Holocaust Studies* 27(1):1–11. doi: 10.1080/17504902.2019.1625110.
- Pohlman, Annie. 2013. "The Massacres of 1965–1966: New Interpretations and the Current Debate in Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 32(3):3–9. doi: 10.1177/186810341303200301.
- Robinson, Geoffrey B. 2018. *The Killing Season; A History of The Indonesian Massacres, 1965–66*. New Jersey: Princeton University Press.
- Roosa, John. 2020. *Buried Histories: The Antocommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia*. diedit oleh S. Straus, T. Haberkorn, dan S. J. Stern. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Roosa, John, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid. 2004. *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- Scarre, Chris, dan Geoffrey Scarre. 2006. *The Ethics of Archaeology: Philosophical Perspectives on Archaeological Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siregar, Sondang Martini. 2019. "Paradigma Dalam Ilmu Arkeologi." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 15(2):200–205. doi: 10.21831/istoria.v15i2.26781.
- Suriyanto, Rusyad Adi. 2016. "Arkeologi Forensik: Perkembangan Dan Capaiannya Di Indonesia." *Berkala Arkeologi* 36(1):45–70. doi: 10.30883/jba.v36i1.224.
- Werdininggar, Silvia Pristi. 2015. "Tragedi 1965 di Indonesia Perspektif Kambing Hitam Rene Girard." *Skripsi Universitas Sanata Dharma* 1–72.
- Wieringa, Saskia Eleonora. 2011. "Sexual Slander

and the 1965/66 Mass Killings in Indonesia: Political and Methodological Considerations." *Journal of Contemporary Asia* 41(4):544–65. doi: 10.1080/00472336.2011.610613.

Wijadmi, Lidwina. 1998. "Perkembangan PKI Pemberontakan dan Pergantian Pemerintah RI 1950-1966." *Skripsi Universitas Sanata Dharma*.